



## Studi Evaluasi Sekolah dalam Pembelajaran Anak Berkebutuhan Khusus di Sekolah Dasar Reguler

Ni Komang Tri Cipta Sari<sup>1✉</sup>, I Gede Astawan<sup>2</sup>, Putu Rahayu Ujianti<sup>3</sup>

Universitas Pendidikan Ganesha, Indonesia<sup>1,2,3</sup>

e-mail : [tri.cipta@undiksha.ac.id](mailto:tri.cipta@undiksha.ac.id)<sup>1</sup>, [astawan@undiksha.ac.id](mailto:astawan@undiksha.ac.id)<sup>2</sup>, [puturahayuuji@undiksha.ac.id](mailto:puturahayuuji@undiksha.ac.id)<sup>3</sup>

### Abstrak

Penelitian ini mengevaluasi program pelaksanaan pembelajaran bagi ABK di Gugus I Nakula Kabupaten Jembrana. Tujuan penelitian yaitu mendeskripsikan bagaimana *context*, *input*, *process*, dan *product* dalam penyelenggaraan pembelajaran anak berkebutuhan khusus di SD reguler. Metode penelitian dengan pendekatan kualitatif dengan model evaluasi CIPP (*context*, *input*, *process*, *product*) dengan metode pengumpulan yaitu, wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis dengan 3 tahapan yaitu reduksi, penyajian, dan verifikasi. Pada tahap *context*, kurikulum yang digunakan adalah kurikulum standar nasional, manajemen penerimaan siswa baru berpatok pada zonasi, serta kurangnya sosialisasi tentang masyarakat inklusif. Evaluasi *input* dari aspek guru perlunya peningkatan kompetensi guru pendamping bagi siswa ABK, pada aspek peserta didik menunjukkan bahwa semua siswa dapat berkomunikasi dan bekerjasama tanpa melihat siswa normal atau ABK, sehingga tidak ada diskriminasi dan *bullying* di sekolah. Evaluasi *process* perlu perbaikan karena selama proses belajar sarana prasarana yang menunjang pembelajaran masih kurang lengkap ataupun tidak ada. Sedangkan pada evaluasi *product* hasil belajar siswa masih harus dikembangkan sesuai bakat, dan minat agar tercapai tujuan dari tujuan pembelajaran. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa hasil evaluasi pembelajaran anak berkebutuhan khusus (ABK) di sekolah perlu evaluasi lebih lanjut untuk keberlangsungan pelaksanaan pembelajaran sekolah inklusif.

**Kata Kunci:** Pendidikan Inklusif, Anak Berkebutuhan Khusus, Model CIPP.

### Abstract

This research evaluates the learning implementation program for ABK in Cluster I Nakula, Jembrana Regency. The aim of the research is to describe the *context*, *input*, *process* and *product* in organizing learning for children with special needs in regular elementary schools. The research method uses a qualitative approach with the CIPP (*context*, *input*, *process*, *product*) evaluation model with collection methods, namely, interviews, observation and documentation, then analyzed in 3 stages, namely reduction, presentation and verification. At the *context* stage, the curriculum used is the national standard curriculum, the management of new student admissions is based on zoning, and there is a lack of socialization about an inclusive society. Evaluation of *input* from the teacher aspect requires increasing the competence of accompanying teachers for ABK students, in the student aspect it shows that all students can communicate and work together without looking at normal students or ABK, so that there is no discrimination and *bullying* at school. The evaluation process needs improvement because during the learning process the infrastructure that supports learning is still incomplete or non-existent. Meanwhile, in *product* evaluation, student learning outcomes still have to be developed according to their talents and interests in order to achieve the learning objectives. Based on the research results, it can be concluded that the results of the evaluation of learning for children with special needs (ABK) in schools need further evaluation for the sustainability of the implementation of inclusive school learning.

**Keywords:** Inclusive Education, Children with Special Needs, CIPP Model.

Copyright (c) 2024 Ni Komang Tri Cipta Sari, I Gede Astawan, Putu Rahayu Ujianti

✉ Corresponding author :

Email : [tri.cipta@undiksha.ac.id](mailto:tri.cipta@undiksha.ac.id)

DOI : <https://doi.org/10.31004/edukatif.v6i2.6540>

ISSN 2656-8063 (Media Cetak)

ISSN 2656-8071 (Media Online)

## PENDAHULUAN

Deklarasi Salamanca (UNESCO, 1994) dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menegaskan bahwa Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan tanpa diskriminasi. Pendekatan inklusif dalam sekolah reguler dianggap sebagai metode paling efektif untuk mencegah diskriminasi dan menciptakan masyarakat inklusif. ABK secara umum diidentifikasi sebagai anak-anak yang secara signifikan berbeda dengan anak-anak lain dari usia yang sama dan memerlukan layanan pendidikan khusus. (Wibowo & Anjar, 2015). Perbedaan antara anak ABK dan anak normal adalah mereka memiliki disabilitas, prestasi akademik rendah, dan tidak dapat mengungkapkan bahasa dengan baik. Di Indonesia, Hak Asasi Manusia (HAM) menuntut perhatian lebih dari semua pihak terhadap isu pendidikan. Pendidikan merupakan hak setiap individu tanpa diskriminasi berdasarkan kelas sosial, ras, suku, jenis kelamin, agama, atau kondisi fisik, termasuk untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Mudjito (dalam Wardhani, 2020) mengemukakan bahwa masih banyak anak berkebutuhan khusus di Indonesia yang belum mendapatkan haknya sesuai kebutuhannya.

Dalam sejarah perkembangan model pendidikan ABK, terdapat 3 pelayanan, yaitu pemisahan (segregasi), terpadu (*mainstream*) dan inklusif. Model pertama adalah bentuk pendidikan yang tersegregasi disebut Sekolah Luar Biasa (SLB) model ini ditandai dengan pemisahan layanan ABK dengan anak normal. Hal ini mencerminkan pelebelan negatif pada ABK dengan siswa lainnya (Latifah, 2020) Pelayanan pendidikan ABK mempunyai model kedua *mainstream*, yaitu suatu sistem pendidikan yang menempatkan ABK pada sekolah biasa dan mengikuti peraturan kurikulum yang berlaku. Biasanya ditargetkan pada anak-anak sakit dengan gangguan kognitif seperti epilepsi, asma, dan gangguan sensorik, serta anak-anak dengan disabilitas fisik. Widyastono (dalam Hartadi et al., 2019) mengemukakan sejak munculnya konsep *mainstream* pada tahun 1980an, sekolah negeri gencar mempromosikan pendidikan ABK komprehensif. Pendidikan inklusif atau menggabungkan ABK dengan siswa “normal” dengan sekolah menyesuaikan dengan kebutuhan anak.

Meningkatkan kualitas pendidikan inklusif, disarankan untuk memperhatikan pembelajaran dan kebutuhan anak berkebutuhan khusus sesuai dengan disabilitasnya (Anggriana & Trisnani, 2016). Guru sebagai tolak ukur keberhasilan pelaksanaan pembelajaran memiliki tanggung jawab yang besar bagi peningkatan kemampuan belajar siswa. Strategi pembelajaran yang dapat diterapkan untuk siswa ABK di tingkat Sekolah Dasar mencakup pengajaran remedial, strategi deduktif dan induktif, pendekatan heuristik, ekspositori, pembelajaran klasikal, kooperatif, serta teknik untuk perubahan perilaku. (Yuwono & Mirnawati, 2021). Selain kesiapan strategi guru, sekolah juga diharapkan memiliki kesiapan dalam penerimaan ABK. Kesiapan sekolah dalam penerima ABK harus memperhatikan tenaga pendidik atau pendampingan, perencanaan pembelajaran, dan juga sarana dan prasarana. Dukungan masyarakat juga sangat penting bagi pelaksanaan program sekolah. Permasalahan pendidikan tidak dapat diatasi hanya oleh pemerintah dan/atau institusi sekolah, tetapi juga memerlukan partisipasi aktif masyarakat (orang tua, keluarga/wali, masyarakat luas) untuk mengatasi permasalahan pendidikan inklusif dan melaksanakan program pendidikan (Sukmawati, 2018).

Pendidikan anak berkebutuhan khusus di Bali telah menjadi bagian yang tidak asing lagi. Pada tahun 2014, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Provinsi Bali menyampaikan bahwa pendidikan inklusif mengacu pada penyelenggaraan sekolah reguler yang menyediakan tempat bagi anak-anak normal dan anak-anak berkebutuhan khusus (ABK). Sebanyak 94 sekolah, mulai dari tingkat dasar hingga menengah atas dan kejuruan, di Bali telah menerapkan program pendidikan inklusif atau pembelajaran untuk siswa-siswa ABK. Realitanya penyelenggaraan pendidikan bagi siswa ABK di Kabupaten Jembrana masih dianggap asing bagi beberapa masyarakat, dalam beberapa fenomena masyarakat belum dapat menerima anak berkebutuhan khusus bersekolah dengan siswa lain di sekolah reguler. Di gugus I Nakula contohnya,

pendidikan bagi ABK masih dianggap tabu. Masyarakat beranggapan mengapa anak berkebutuhan khusus harus bersekolah di sekolah reguler, bukan di sekolah luar biasa (SLB). Berdasarkan hal tersebut diperlukannya evaluasi program pelaksanaan pembelajaran bagi ABK di Gugus I Nakula Kabupaten Jembrana. Evaluasi yang dilakukan dengan model CIPP agar data yang dikumpulkan bersifat komprehensif atau menyeluruh. Data yang dikumpulkan disesuaikan dengan Permendiknas No 70 Tahun 2009 sehingga sesuai dengan pedoman pelaksanaan pembelajaran pendidikan inklusif.

Pada penelitian Fitriana et al., (2022) mengkaji tentang penyelenggaraan pendidikan inklusif di Sekolah Dasar Kecamatan Koja Jakarta Utara, pada penelitian ini mengevaluasi rencana pengembangan sekolah, anggaran khusus, kurikulum, pengembangan studi individu. Dalam penelitian ini juga menggunakan model CIPP. Penelitian yang dilakukan oleh Mumpuniarti & Lestari (2019) memaparkan bahwa guru di tingkat taman kanak-kanak memiliki sikap positif dan kemauan menerima yang lebih tinggi. Di tingkat SD dan SMP, masih ada beberapa sekolah yang merasa belum siap menerima keberagaman siswa di kelasnya. Fakta ini menunjukkan bahwa tingkat Taman Kanak-Kanak mengalami kemajuan dalam kesadaran kelas akan keragaman siswa. Penelitian ini juga relevan dengan penelitian Yuwono & Mirnawati (2021) Strategi pembelajaran yang dapat diterapkan untuk peserta didik ABK di Sekolah Dasar mencakup pengajaran remedial, strategi deduktif dan induktif, pendekatan heuristik, ekspositori, pembelajaran klasikal, pembelajaran kooperatif, serta teknik perubahan perilaku. Guru disarankan untuk menggunakan media pembelajaran yang cocok bagi siswa berkebutuhan khusus, seperti puzzle, untuk memberikan dukungan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Terdapat juga penelitian Angreni & Sari (2022) dalam penelitiannya, berdasarkan analisis data yang dilakukan, ditemukan bahwa proses pembelajaran untuk anak berkebutuhan khusus mencakup rencana pelaksanaan pembelajaran, penggunaan media, dan strategi pembelajaran yang relatif sama dengan siswa normal. Selama pelajaran, kelas dan model pelayanannya juga tidak berbeda dari siswa biasa. Meski demikian, beberapa sekolah telah memodifikasi proses pembelajaran, baik dalam hal rencana pembelajaran, media dan strategi pembelajaran, maupun persyaratan kurikulum.

Penelitian sebelumnya telah melakukan penelitian pembelajaran anak berkebutuhan khusus di Sekolah Dasar. Hasil penelitian tersebut dijadikan acuan dan dasar dalam pedoman atau acuan dalam evaluasi lanjutan. Akan tetapi, penelitian evaluasi pembelajaran anak berkebutuhan khusus di gugus I Nakula Kabupaten Jembrana belum pernah dilakukan, sehingga penelitian studi evaluasi pembelajaran anak berkebutuhan khusus di sekolah dasar gugus I Nakula Kabupaten Jembrana bersifat baru dan penting dilakukan karena untuk mengetahui sejauh mana sekolah reguler memberikan pelayanan bagi siswa ABK serta evaluasi perlu dilakukan untuk perbaikan dari program pembelajaran bagi ABK. Penelitian ini menggunakan model CIPP sebagai sarana evaluasi dengan Permendiknas No 70 Tahun 2009 sebagai acuan dalam pedoman implementasi sekolah inklusif.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dan jenis penelitian evaluasi dengan model evaluasi CIPP (*Context, Input, Process, Product*). Subjek penelitian ini adalah kepala sekolah dan guru. Lokasi penelitian dilakukan di SDN 1 Baler Bale Agung, SDN 3 Baler Bale Agung, SDN 1 Banjar Tengah, SDN 2 Banjar Tengah, dan SDN 3 Banjar Tengah yang merupakan sekolah yang berada di Gugus I Nakula Kabupaten Jembrana. Waktu penelitian dilakukan sejak observasi awal hingga pengambilan data dimulai sejak September hingga Februari 2024. Proses penelitian dilakukan dengan menganalisis data untuk menjawab pertanyaan penelitian tanpa melakukan pengujian hipotesis. Kurniawati (2021) memaparkan bahwa penggunaan model CIPP pada evaluasi agar data yang didapatkan lebih komprehensif atau menyeluruh tidak hanya melihat hasil saja. Model CIPP membuat data lebih terpadu dan mendasar (Wijayanti et al., 2019). Data utama dari penelitian ini meliputi data konteks, data masukan, data proses, dan data produk. Data ini dapat

diperoleh melalui analisis reduksi, penyajian, dan verifikasi, dengan menggunakan metode pengumpulan data seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Data yang telah diperoleh, dianalisis dengan menggunakan tiga tahapan yaitu reduksi, penyajian dan verifikasi (Sugiyono, 2013). Penelitian ini melibatkan beberapa tahap. Tahap pertama adalah pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data yang terkumpul kemudian direduksi atau dipilah berdasarkan kategori masing-masing atau sesuai dengan kerangka CIPP dan aspek yang diatur dalam Permendiknas No 70 Tahun 2009. Data ini kemudian akan disajikan dengan berbagai cara sesuai kebutuhan, seperti deskripsi singkat, tabel, skema, grafik, persentase, atau format lainnya. Data disajikan dengan pengelompokan model CIPP untuk menjawab rumuan masalah. Jika hasil analisis data masih menemukan kesimpulan atau hasil penelitian masih belum jelas, maka keadaan ini dapat diatasi dengan verifikasi sehingga hasil penelitian dapat dikonfirmasi. Jika masih kurang jelas, dapat diperjelas, yang dapat membuat kesimpulan penelitian lebih meyakinkan. Hal ini dapat diverifikasi dengan melihat kausalitas.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Evaluasi pelaksanaan program inklusi dilakukan melalui metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil wawancara dengan guru divalidasi melalui wawancara dengan kepala sekolah. Data wawancara tersebut kemudian dibandingkan dengan hasil observasi dan dokumentasi untuk memastikan keabsahan data. Dalam evaluasi ini, peneliti menggunakan model evaluasi CIPP dan mengacu pada Permendiknas No. 70 Tahun 2009 tentang pedoman implementasi pendidikan inklusif serta komponen-komponen sekolah inklusif.

### Evaluasi Context

Pada evaluasi *context* terdapat kelemahan dan kelebihan penyelenggaraan pembelajaran bagi siswa ABK. Pada komponen kurikulum terdapat kelemahan yaitu hanya berpatokan pada kurikulum standar nasional, hal ini berdampak pada penggunaan materi serta sistem evaluasi atau penilaian bagi siswa yang sama, sehingga siswa ABK sangat tertinggal jauh pada saat pembelajaran di dalam kelas. Pasal 8 ayat 1 dari Permendiknas No 70 Tahun 2009 menyatakan bahwa penilaian hasil belajar peserta didik dalam pendidikan inklusif disesuaikan dengan jenis kurikulum yang diterapkan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan. Sedangkan pada sekolah dasar Gugus I Nakula menggunakan kurikulum standar nasional di mana pada kurikulum ini penilaian hasil belajar berdasarkan pada ketuntasan belajar peserta didik, sedangkan jenis siswa ABK pada sekolah dasar Gugus I Nakula adalah anak dengan kemampuan di bawah rata-rata, kurikulum yang dapat digunakan adalah kurikulum akomodatif karena sistem penilaian atau kenaikan kelas menggunakan usia kronologis. Kognitif anak berkebutuhan khusus berbeda secara signifikan dari anak normal, sehingga kurikulumnya harus disesuaikan. Meskipun berada pada jenjang pendidikan yang sama, yaitu tingkat formal, kurikulum untuk anak berkebutuhan khusus seharusnya memiliki perbedaan yang signifikan (Aslan, 2017).

Pada komponen manajemen sekolah memiliki kelemahan pada penerima peserta didik baru (PPDB) yang hanya menggunakan jalur zonasi, padahal penerimaan peserta didik baru (PPDB) menggunakan sistem Zonasi hal ini sudah dijelaskan pada Perda Jembrana nomor 18 Tahun 2019 Bab II Pasal 16 ayat 2 menegaskan bahwa kuota zonasi paling sedikit 90% termasuk siswa kurang mampu dan anak penyandang disabilitas pada sekolah yang menyelenggarakan layanan inklusif. Selain pada manajemen penerima siswa baru, pada manajemen anggaran sekolah tidak mendapatkan anggaran khusus bagi sekolah yang memiliki siswa ABK hal ini berdampak pada kesediaan sarana dan prasarana dalam menunjang pembelajaran siswa ABK. Ini bertentangan dengan Pasal 51 Ayat 2 Bab V dari Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 yang menegaskan bahwa pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat seharusnya berkontribusi dalam pembiayaan pendidikan inklusi untuk meningkatkan efektivitasnya. Karena kurangnya dukungan ini, terjadi kekurangan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mengembangkan kemampuan, bakat, dan minat siswa berkebutuhan khusus. Noviandari & Huda (2018) memaparkan peran pemerintah daerah sangat penting

dalam memaksimalkan layanan pendidikan bagi ABK, baik sebagai pembuat kebijakan maupun dalam pemberdayaan dan pengembangan pendidikan untuk anak-anak tersebut. Kemudian pada manajemen tenaga pendidik memiliki kekurangan yaitu kurangnya kompetensi yang dimiliki guru dalam mengajar siswa ABK, hal ini menyebabkan siswa ABK harus didampingi oleh guru di kelas serta guru harus lebih *extra* dalam mengajar siswa karena belum mengetahui strategi pembelajaran yang tepat. Secara faktual, dalam konteks inklusi, kekurangan guru pendamping khusus yang mendampingi anak-anak berkebutuhan khusus di sekolah inklusi merupakan masalah yang cukup penting. (Udhiyanasari, 2019). Sikap guru dalam mengajar anak-anak berkebutuhan khusus di kelas terpengaruh oleh hal ini. Keterbatasan waktu dan tenaga guru sering membuat anak-anak berkebutuhan khusus tidak mendapatkan perhatian yang seharusnya, sehingga mereka sering terabaikan di lingkungan sekolah.

Pemberdayaan masyarakat masih menjadi kendala sekolah dalam pelaksanaan pembelajaran bagi siswa ABK orang tua siswa masih banyak yang belum paham tentang sekolah inklusif sehingga masih sulit menerima siswa ABK. Pendapat (Syaputri & Afriza, 2022) menjelaskan ketidakpahaman masyarakat umum mengenai kondisi anak berkebutuhan khusus merupakan masalah serius. Jika kondisi ini dibiarkan, hal tersebut dapat berdampak negatif pada perkembangan anak karena mereka dapat mengalami isolasi sosial dari masyarakat dan bahkan lingkungan keluarga mereka. Pada evaluasi *context* ini juga memiliki kelebihan yaitu pada pemberdayaan masyarakat di lingkungan sekolah, siswa ABK dapat bersosialisasi dengan semua warga sekolah, serta guru, siswa, TU, serta penjaga kantin juga menerima keberadaan siswa ABK tanpa adanya diskriminasi, sehingga siswa ABK dapat bersekolah dengan nyaman.

### **Evaluasi Input**

Evaluasi *input* komponen tenaga pendidik bahwa guru tidak memiliki strategi khusus dalam mengajar siswa ABK, guru hanya mendampingi dan membantu siswa ABK selama pembelajaran di kelas sesuai dengan kebutuhannya, strategi ini dilakukan karena siswa ABK di kelas tidak dapat mengikuti pembelajaran seperti siswa lain. Guru tidak dapat optimal dalam memberikan perhatian khusus bagi siswa ABK karena guru juga memberikan pelayanan untuk siswa lain. Abdah (2020) berpendapat guru pendamping yang spesialis di kelas juga bertindak sebagai guru reguler di kelas, sehingga tanggung jawabnya tidak hanya terfokus pada siswa dengan kebutuhan khusus, tetapi juga siswa biasa. Ini mengakibatkan pembelajaran terlihat tidak optimal. Guru di Gugus 1 Nakula belum pernah mengikuti pelatihan khusus dalam mengajar siswa ABK. Dari 5 sekolah dasar hanya 1 guru yang sudah mengikuti pelatihan khusus, hal ini berdampak kurangnya strategi dan masukan yang diterima guru dalam mengajar siswa ABK. Hasil temuan ini berlawanan dengan ketentuan dalam Pasal 10 Ayat 3 dari Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009, yang menetapkan bahwa pemerintah kabupaten/kota memiliki kewajiban untuk meningkatkan kompetensi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dalam bidang pendidikan khusus di satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif. Penting untuk menyelenggarakan pelatihan bagi guru pendamping khusus agar mereka dapat memberikan layanan yang sesuai dengan kebutuhan siswa berkebutuhan khusus, hal ini juga dijelaskan oleh Atmojo et al., (2020) setelah mengikuti pelatihan dan memperoleh pemahaman tentang merancang RPP serta mengujinya, guru telah mempersiapkan diri untuk mengelola pembelajaran di lingkungan inklusi dengan memperhatikan strategi penanganan anak-anak berkebutuhan khusus. Komponen peserta didik, siswa ABK lebih banyak bermain daripada belajar, karena realita di lapangan menunjukkan bahwa siswa ABK kesulitan dalam mengikuti pembelajaran di kelas. Akan tetapi siswa ABK dapat bersosialisasi, bermain dan bercengkrama dengan semua warga sekolah sehingga selama observasi dilakukan tidak adanya tanda-tanda diskriminasi.

### **Evaluasi Process**

Proses atau kegiatan pembelajaran di kelas maupun di luar kelas. Guru/wali kelas membantu mendampingi siswa ABK dalam belajar. Guru di gugus I Nakula memiliki kendala saat mengajar karena karakteristik siswa ABK yang berbeda dengan siswa lain. Kendala yang dihadapi ABK adalah siswa ABK

masih lamban dalam belajar dan kurang memiliki daya perhatian terhadap pelajaran yang diajarkan, sehingga memerlukan waktu yang cukup lama untuk menjelaskan dan mengulang materi yang diajarkan (Mulyani & Abidinsyah, 2021). Karena karakteristik siswa yang berbeda dengan siswa lain, guru diharapkan tetap dapat memberikan kesempatan yang sama siswa ABK dengan siswa lain, hal ini juga dijelaskan Aziz & Prabowo (2015) bahwa guru mata pelajaran memberikan perlakuan yang setara terhadap siswa lambat belajar selama proses pembelajaran, sejajar dengan siswa reguler. Dengan demikian, tantangan yang dihadapi oleh siswa lambat belajar dapat diidentifikasi dan potensi mereka dapat dikembangkan. Selain itu, siswa ABK di diperlakukan berbeda ketika pembelajaran di dalam kelas hal ini karena siswa ABK memerlukan pendampingan khusus oleh guru di dalam kelas, memang tidak ada kesenjangan seperti pilih kasih atau perlakuan yang signifikan selain pendampingan belajar, saat kegiatan pembelajaran ketika siswa lain sudah mendapatkan tugas dan guru mendampingi siswa ABK belajar guru juga memberikan perhatian kepada siswa yang ingin bertanya, ini juga menjadi contoh bagi siswa lain sehingga tidak ada diskriminasi di sekolah.

### **Evaluasi Product**

Hasil belajar siswa ABK dapat mencapai tujuan pembelajaran dan rata-rata sudah mencapai KKM satuan pendidikan yang ditentukan oleh sekolah tetapi tetap dalam pendampingan guru/wali kelas. Aspek evaluasi untuk anak berkebutuhan khusus sejalan dengan anak-anak pada umumnya, mencakup penilaian terhadap aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik, yang disesuaikan dengan karakteristik unik dari setiap anak berkebutuhan khusus (Oktaviana Bhena et al., 2023). Siswa ABK diberikan nilai sesuai dengan KKM agar dapat naik kelas dan tuntas dalam pembelajaran. Penyesuaian evaluasi dilakukan oleh guru di Gugus I Nakula untuk membantu siswa ABK dalam ketuntasan belajar, hal ini juga sejalan dengan penelitian Oktorima (2015) penyesuaian penilaian hasil belajar untuk anak-anak berkebutuhan khusus melibatkan tiga aspek utama, yakni penyesuaian waktu, cara, dan materi. Penyesuaian ini sangat penting dilakukan untuk mendukung pelayanan yang tepat bagi siswa ABK.

Hasil analisis penelitian di Gugus 1 Nakula menunjukkan bahwa warga sekolah, termasuk kepala sekolah, guru, siswa, dan staf, telah mencapai tingkat masyarakat inklusif. Mereka mampu menerima perbedaan, bekerja sama, dan tidak melakukan diskriminasi, menunjukkan inklusivitas dalam komponen warga sekolah. Namun, pelaksanaan program pembelajaran untuk siswa ABK di Gugus I Nakula masih belum optimal, dan pendidikan inklusif belum berjalan sesuai harapan pemerintah. Dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif, beberapa komponen yang harus dipenuhi termasuk peserta didik, tenaga pendidik, kurikulum, serta sarana dan prasarana (Pembinaan Sekolah Luar Biasa, 2007). Selama proses evaluasi, penting untuk mencatat beberapa poin kunci, termasuk kesiapan sekolah dalam menjalankan pendidikan inklusif, kemampuan guru dalam mendukung pembelajaran anak-anak berkebutuhan khusus sesuai dengan minat dan kecenderungan mereka, serta perlunya kerjasama antara sekolah, dinas pendidikan, dan psikolog untuk memberikan layanan terbaik bagi siswa berkebutuhan khusus di sekolah reguler.

### **SIMPULAN**

Pada evaluasi *context* dimana pada evaluasi masih belum terlaksana penyesuaian kurikulum bagi siswa Manajemen sekolah seperti tidak ada kesiapan anggaran dalam menjangkau proses pembelajaran, penerimaan peserta didik baru (PPDB) hanya berpatok pada persyaratan zonasi, kompetensi guru untuk membantu siswa ABK masih kurang. Pada evaluasi *input* tenaga pendidik masih belum memiliki kompetensi atau pemahaman mengenai perkembangan siswa ABK. Kegiatan siswa ABK di sekolah selain belajar yang dibantu oleh guru siswa ABK mampu bersosialisasi dengan warga sekolah. Pada evaluasi *process* pembelajaran berjalan dengan cukup baik, guru mendampingi siswa ABK karena kesulitan untuk mengikuti pembelajaran seperti siswa lain, Hal ini juga menyebabkan guru di kelas harus lebih intens dalam mendampingi siswa belajar. Evaluasi *Product* yang dilihat dari hasil belajar siswa terdapat peningkatan tetapi tetap dalam pengawasan guru/wali

1761 *Studi Evaluasi Sekolah dalam Pembelajaran Anak Berkebutuhan Khusus di Sekolah Dasar Reguler - Ni Komang Tri Cipta Sari, I Gede Astawan, Putu Rahayu Ujjianti*  
DOI : <https://doi.org/10.31004/edukatif.v6i2.6540>

kelas selama pembelajaran agar hasil belajar siswa sesuai dengan tujuan pembelajaran. Hasil belajar siswa masih perlu dievaluasi lebih lanjut agar sesuai dengan bakat dan minat siswa.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Segenap penulis skripsi menyampaikan ucapan terima kasih atas kasih sayang para dosen di Fakultas Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas Pendidikan Ganesha yang telah memberikan dukungan dan bantuan baik secara materi maupun materil. Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga di Kabupaten Buleleng dan Kabupaten Jembrana telah melakukan sesuatu yang sangat mirip dengan bantuan yang luar biasa dari penulis untuk menyelesaikan penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdah, R. (2020). Peranan Guru Dalam Memberikan Bimbingan Terhadap Anak Dengan Kebutuhan Khusus Di Sekolah Luar Biasa Negeri 1 Kota Jambi. *Jurnal Khazanah Intelektual*, 3(2), 505–513. <https://doi.org/10.37250/Newkiki.V3i2.51>
- Anggriana, T. M., & Trisnani, R. P. (2016). Kompetensi Guru Pendamping Siswa Abk Di Sekolah Dasar. *Jurnal Konseling Gusjigang*, 2(2), 157–164. <https://doi.org/10.24176/Jkg.V2i2.702>
- Angreni, S., & Sari, R. T. (2022). Analisis Pembelajaran Anak Berkebutuhan Khusus Di Sekolah Dasar Inklusi Kota Padang. 8(1), 94–102. <http://dx.doi.org/10.31949/Jcp.V6i1.3487>
- Aslan. (2017). Kurikulum Bagi Anak Berkebutuhan Khusus ( Abk ). *Jurnal Studia Insania*, 5(2), 105–119.
- Atmojo, S. E., Lukitoaji, B. D., & Noormiyanto, F. (2020). Pelatihan Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus Bagi Guru Sekolah Dasar Rujukan Inklusi. *Jurnal Abdimas Bsi: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(2), 244–252. <https://doi.org/10.31294/Jabdimas.V3i2.8139>
- Aziz, A. N., & Prabowo, A. (2015). Analisis Proses Pembelajaran Matematika Pada Anak Berkebutuhan Khusus ( Abk ) Slow Learner Di Kelas Inklusif Smp Negeri 7 Salatiga. *Jurnal Matematika Kreatif - Inovatif*, 6(2), 111–120. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.15294/Kreano.V6i2.4168>
- Fitriana, F., Lestari, I., & Sapriati, A. (2022). Evaluasi Pendidikan Inklusi Di Sekolah Dasar Kecamatan Koja Jakarta Utara. *Jurnal Studi Guru Dan Pembelajaran*, 5(2), 191–200. <https://doi.org/10.30605/Jsgp.5.2.2022.1677>
- Hartadi, D. R., Dewantoro, D. A., & Junaidi, A. R. (2019). Kesiapan Sekolah Dalam Melaksanakan Pendidikan Inklusif Untuk Anak Berkebutuhan Khusus Di Sekolah Dasar. *Jurnal Ortopedagogia*, 5(2), 90. <https://doi.org/10.17977/Um031v5i22019p90-95>
- Kurniawati, E. W. (2021). Evaluasi Program Pendidikan Perspektif Model Cipp (Context, Input, Process, Product). *Evaluasi: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 2(1), 25. <https://doi.org/10.32478/Evaluasi.V6i1.848>
- Latifah, I. (2020). Pendidikan Segregasi, Mainstreaming, Integrasi Dan Inklusi, Apa Bedanya? *Jurnal Pendidikan*, 29(2), 101–108. <https://doi.org/10.32585/Jp.V29i2.676>
- Mulyani, D. W. C., & Abidinsyah. (2021). Strategi Pembelajaran Peserta Didik Anak Berkebutuhan Khusus (Abk) Di Sdn Antar Baru 1 Maraban. *Jurnal Pendidikan Hayati*, 7(4), 197–216.
- Mumpuniarti, M., & Lestari, P. H. K. (2019). Kesiapan Guru Sekolah Reguler Untuk Implentasi Pendidikan Inklusif. *Jpk (Jurnal Pendidikan Khusus)*, 14(2), 57–61. <https://doi.org/10.21831/Jpk.V14i2.25167>
- Noviandari, H., & Huda, T. F. (2018). Peran Pemeirntah Dalam Pemberian Layanan Pendidikan Bagi Anak Berkebutuhan Khusus (Abk) Di Banyuwangi. *Fkip Universitas Pgri Banyuwangi Seminar Nasional Pendidikan Budaya Dan Sejarah : “Diibalik Revitalisasi Budaya,”* 141–147. <https://doi.org/10.31227/Osf.io>
- Oktaviana Bhena, M. M., Odje, M. S., Maria Pawe, Y., & Manggus, M. Y. (2023). Evaluasi Pembelajaran

- 1762 *Studi Evaluasi Sekolah dalam Pembelajaran Anak Berkebutuhan Khusus di Sekolah Dasar Reguler - Ni Komang Tri Cipta Sari, I Gede Astawan, Putu Rahayu Ujjanti*  
DOI : <https://doi.org/10.31004/edukatif.v6i2.6540>
- Anak Berkebutuhan Khusus Di Sekolah Dasar. *Jurnal Pendidikan Inklusi Citra Bakti*, 1(1), 68–74.  
<https://doi.org/10.38048/Jpicb.V1i1.2111>
- Oktorima, O. (2015). Penilaian Hasil Belajar Anak Berkebutuhan Khusus Di Sekolah Penyelenggara Inklusif Sd N 01 Limau Manis (Penelitian Studi Kasus). *Jurnal Ilmiah Pendidikan Khusus*, 1(3), 340–349.  
<http://ejournal.unp.ac.id/index.php/jupekhu>
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D – Mpkk – Toko Buku Bandung*.  
<https://cvalfabeta.com/product/metode-penelitian-kuantitatif-kualitatif-dan-rd-mpkk/>
- Sukmawati, H. (2018). Pemberdayaan Masyarakat Dalam Dunia Pesantren. *Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 4(1), 71–77.
- Syaputri, E., & Afriza, R. (2022). Peran Orang Tua Dalam Tumbuh Kembang Anak Berkebutuhan Khusus (Autisme). *Educativo: Jurnal Pendidikan*, 1(2), 559–564. <https://doi.org/10.56248/Educativo.V1i2.78>
- Udhiyanasari, K. Y. (2019). Sikap Guru Terhadap Anak Berkebutuhan Khusus Di Sekolah Inklusi. *Joeai (Journal Of Education And Instruction)*, 2(1), 15–24.
- Wardhani, M. K. (2020). Persepsi Dan Kesiapan Mengajar Mahasiswa Guru Terhadap Anak Berkebutuhan Khusus Dalam Konteks Sekolah Inklusi. *Scholaria: Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 10(2), 152–161. <https://doi.org/10.24246/J.Js.2020.V10.I2.P152-161>
- Wibowo, S. B., & Anjar, T. (2015). Studi Kasus Pola Relasi Sosial Anak Berkebutuhan Khusus (Abk) Tuna Daksa Yang Berada Di Sd Umum(Inklusi) Di Kota Metro. *Sosio-Humaniora*, 6(1), 23–33.
- Wijayanti, N. I., Yulianti, R., & Wijaya, B. (2019). Evaluasi Program Pendidikan Pemakai Dengan Model Cipp Di Perpustakaan Fakultas Teknik Ugm. *Tik Ilmeu : Jurnal Ilmu Perpustakaan Dan Informasi*, 3(1), 37. <https://doi.org/10.29240/Tik.V3i1.790>
- Yuwono, I., & Mirnawati, M. (2021). Strategi Pembelajaran Kreatif Dalam Pendidikan Inklusi Di Jenjang Sekolah Dasar. *Jurnal Basicedu*, 5(4), 2015–2020.  
<https://doi.org/10.31004/basicedu.v5i4.1108>